

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya jaman diikuti juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi dan globalisasi berjalan beriringan, sehingga hal ini saling memiliki keterkaitan. Dengan adanya globalisasi, kehidupan semakin berubah dan digantikan dengan teknologi yang membuatnya semakin mudah. Seperti yang dikatakan Irnawati (2015) kehadiran teknologi informasi saat ini disebabkan karena globalisasi dalam kehidupan organisasi, meningkatnya persaingan bisnis, dan bertambah singkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditawarkan, serta meningkatnya tuntutan selera konsumen terhadap produk dan jasa tersebut. Sehingga peranan teknologi sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Hampir semua penduduk Indonesia menggunakan teknologi dalam kehidupannya. Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Sepanjang 2017 lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung oleh jaringan internet (Bohang, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peranan teknologi sangat membantu segala aktivitas dan menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Penggunaan teknologi digunakan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan administrasi pemerintah. *E-government* merupakan salah satu contoh penggunaan teknologi yang digunakan dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga lebih efektif dan transparan seperti yang disebutkan dalam Inpres No.3

tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat dihilangkan melalui pemanfaatan *e-government* menjadi lebih fleksibel, dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna (Pasaribu, Pasoreh, dan Rondonuwu, 2017).

Untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan teknologi informasi yang sudah berkembang. DJP mengembangkan berbagai pelayanannya seperti online payment, *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. *E-registration* digunakan untuk mempermudah masyarakat yang ingin mendaftar menjadi Wajib Pajak, *e-filling* untuk melaporkan SPT secara elektronik, *e-billing* untuk mempermudah masyarakat membayar pajak (Ferdian, 2018).

Penerapan modernisasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh pemerintah. Biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sebanding untuk pengadaan aplikasi online ini, jika penggunaannya tidak dilakukan secara maksimal oleh masyarakat. Tidak banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dan masih melaporkan SPTnya secara manual. Hal ini dapat terjadi, salah satunya karena kurangnya sosialisasi perpajakan secara elektronik (Tjahono, 2018).

Pajak merupakan salah satu bentuk usaha untuk membantu meningkatkan pembangunan Negara. Karena begitu besarnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadi tugas khusus Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan pajak dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dalam APBN tahun 2019 pemerintah menganggarkan penerimaan sebesar Rp2.165,1 triliun termasuk dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun di dalamnya, dan belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, serta mematok defisit anggaran 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Sedangkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah, sehingga defisit APBN tidak dapat dihindari. Rasio kepatuhan pajak di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 63,16 persen, sementara target defisit fiskal mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peranan pajak dalam penerimaan Negara cukup besar untuk membiayai belanja Negara yang mencapai 2 triliun rupiah, sedangkan realisasi pajak pada tahun 2016 hanya sebesar 1.283,6 triliun (Ariyanti, 2017). Kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, yang tergambarkan dalam rasio pajak yang masih berada di bawah negara lain pada kisaran 12-13 persen. Capaian tax ratio Indonesia masih di bawah Filipina (14 persen), Malaysia (16 persen), Thailand (17 persen), Korea Selatan (25 persen), Afrika Selatan (27 persen), dan Brasil (34 persen), atau rerata Negara berpenghasilan menengah-bawah (17 persen) (Yustinus, 2017). Sehingga Direktorat

Jendral Pajak (DJP) berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai tahun 2017 tercatat sebanyak 238.619 dari total seluruh penduduk di DIY sebanyak 2.720.912 yang artinya 6,41% masyarakat DIY merupakan wirausaha UMKM yang penyebarannya paling besar berada di Kabupaten Bantul dengan presentase 26%, sedangkan pada daerah lain seperti Kulon Progo tercatat hanya 20%, Gunung Kidul 22%, Sleman 18% dan Kota Yogyakarta memiliki presentase paling kecil yaitu sebesar 14%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Yuli Kristiyono, menyatakan kepatuhan pengusaha di Kabupaten Bantul masih terhitung cukup rendah dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, karena diperkirakan hanya 40 persen dari 140 ribu pengusaha di Bantul yang tertib membayar pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bantul (Sidik, 2017). Kabupaten Bantul memiliki potensi yang sangat besar untuk pemasukan pajaknya, karena Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan jumlah pengusaha UMKM terbesar di DIY. Menurut data yang di dapat dari Budi Wiyanto selaku Kepala KPP Pratama Bantul, jumlah UMKM yang sudah mempunyai NPWP sekitar 25.000, angka tersebut terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM di Bantul sekitar 32.000 UMKM (Cyntara , 2018).

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas mengenai modernisasi administrasi perpajakan namun dengan konteks yang berbeda, sehingga akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Diantaranya adalah penelitian Kania, Gede dan Wahyuni (2017) dengan variabel independen *e-system* (*e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-billing*) dan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak. Hasil pada penelitian ini secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa penerapan seluruh *e-system* baik *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT* maupun *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan pada penelitian Rahmadani (2018) membahas mengenai pengaruh persepsi penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, dan *e-SPT* dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian pada variabel *e-billing*, *e-filling* dan *e-SPT* terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak semuanya menunjukkan hasil yang positif, pada salah satu variabel penelitian tersebut menunjukkan hasil negatif atau tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel tersebut adalah *e-registration*.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa apakah dengan adanya modernisasi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing* dapat berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan pajak pengusaha di Bantul yang terhitung cukup rendah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-registration* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Bantul?
2. Apakah penerapan *e-filling* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Bantul?
3. Apakah penerapan *e-billing* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Bantul?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi untuk sistem perpajakan baru yang disediakan, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan maksimal.

2. Bagi akademisi dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan sistem perpajakan secara online, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan Direktorat Jendral Pajak (DPJ) sehingga dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT dan membayar pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi 2019. Berikut merupakan gambaran penulisan:

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kajian Pustaka

Bab ini menjabarkan landasan teori yang menjadi dasar dan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

**BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga pada bab ini berisi mengenai populasi dan



sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, dan pembahasan penelitian berdasar keterkaitan hipotesis dengan hasil analisis.

#### BAB V : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan berdasar hasil dari penelitian tersebut, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.